

# IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

ARIAN MARCELINO  
NPP. 30.0607  
*Asdaf Kota Serang Provinsi Banten*  
*Prodi Studi Kebijakan Publik*  
Email. marcelinoarian123@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. Rusli Razak, AP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The Social Service as the executor of Serang Mayor Regulation Number 41 of 2017 and regional apparatuses that have the function of helping run the wheels of government in the social field have the responsibility to deal with street children, especially to rehabilitate and provide guidance to street children . **Purpose:** to find out how policy implementation, inhibiting factors, and government efforts to overcome inhibiting factors in the implementation of policies for dealing with street children in the Serang City Social Service. **Method:** In this study the author used a qualitative descriptive method. Researchers used observation, interviews and documentation to collect data. The data obtained is then analyzed through Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing/Verification. **Results/Findings:** that of the 8 (eight) dimensions consisting of 17 (seventeen) indicators on the implementation of policies for dealing with street children at the Serang City Social Service there are still obstacles, so that they do not run optimally and must be improved again. The obstacles that the writer found were in Edward III's theory, namely the dimensions of Resources and Disposition dimensions. Constraints were found in the staff indicators and facilities indicators in the Resources Dimension. On the Disposition Dimension the writer found constraints on the Incentive indicator. On the Environmental Dimension, the authors found obstacles to the Halfway House indicator. On the Institutional Dimension, the author finds constraints on the Socialization indicator. The internal inhibiting factors are: 1. The minimum amount of the budget. 2. The lack of the number of employees. 3. Lack of facilities External inhibiting factors are: 1. It is difficult to change the mentality and behavior of street children. 2. There is still a lack of the role of the community. The efforts made by the Serang City Social Service to overcome the inhibiting factors are: 1. Proposing an additional budget to the Serang City Government. 2. Add facilities and infrastructure. 3. Increase employee commitment. **Conclusion:** Implementation of the Mayor's Decree No. 41 of 2017 concerning Street Children at the Serang City Social Service has been carried out well, but there are still some deficiencies, such as the lack of a budget, the limited number of human resources within the Serang City Social Service to deal with street children and other community diseases, the lack of facilities for dealing with street children, and the lack of incentives from the Serang City Social Service to social workers in the field.

**Keywords:** Implementation, Serang Mayor Regulation Number 41 of 2017, Street Children

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP)** : Dinas Sosial selaku pelaksana Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 dan perangkat daerah yang memiliki fungsi untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di bidang sosial memiliki tanggung jawab untuk menangani anak jalanan, terutama untuk merehabilitasi dan memberikan pembinaan kepada anak jalanan. **Tujuan** : untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, faktor penghambat, serta upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Serang. **Metode** : Dalam penelitian kali ini Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang didapat selanjutnya dianalisis melalui *Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification*. **Hasil/Temuan** : bahwa dari 8 (delapan) dimensi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator pada Implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Serang masih ditemukan kendala, sehingga tidak berjalan secara optimal dan harus ditingkatkan lagi. Adapun kendala yang penulis temukan terdapat pada teori Edward III yaitu dimensi Sumber Daya dan dimensi Disposisi. Kendala ditemukan pada indikator staf dan indikator fasilitas pada Dimensi Sumber Daya. Pada Dimensi Disposisi penulis menemukan kendala pada indikator Insentif. Pada Dimensi Lingkungan penulis menemukan kendala pada indikator Rumah Singgah. Pada Dimensi Kelembagaan Penulis menemukan kendala pada indikator Sosialisasi. Faktor penghambat internal ialah: 1. Minimnya jumlah anggaran. 2. Kurangnya kuantitas pegawai. 3. Minimnya fasilitas. Faktor penghambat eksternal ialah: 1. Sulitnya merubah mental dan perilaku anak jalanan. 2. Masih kurangnya peran dari masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk mengatasi faktor penghambat ialah: 1. pengajuan penambahan anggaran kepada Pemerintahan Kota Serang. 2. Menambah sarana dan prasarana. 3. Meningkatkan komitmen para pegawai. **Kesimpulan** : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Serang telah terlaksana dengan baik namun masih didapati beberapa kekurangan seperti minimnya anggaran yang dimiliki, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani anak jalanan dan penyakit masyarakat lainnya, minimnya fasilitas untuk menangani anak jalanan, dan kurangnya pemberian insentif dari Dinas Sosial Kota Serang kepada pekerja sosial di lapangan.

**Kata Kunci** : Implementasi, Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017, Anak Jalanan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data Worldometers pada tahun 2022, penduduk di Indonesia berjumlah 279,36 juta jiwa. Hal ini menyebabkan muncul berbagai permasalahan, baik di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Masalah-masalah yang muncul tentu tidak mudah untuk diatasi dalam waktu yang singkat, namun butuh waktu dan proses yang panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Anak Jalanan merupakan salah satu masalah sosial. Menjamurnya anak jalanan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah keluarga miskin di Indonesia.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan fakir miskin, anak-anak terlantar juga termasuk anak jalanan. Pemerintah Kota Serang khususnya Dinas Sosial harus memikirkan cara untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Serang, seperti halnya

dengan cara meningkatkan pendidikan pada anak jalanan, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain

Keberadaan anak jalanan sering kali dianggap sebagai masalah, padahal seorang anak adalah aset bangsa yang wajib dilindungi dan dijamin kebutuhan hidupnya baik pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya oleh negara

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam mengatasi dan menanggulangi persoalan sosial termasuk anak jalanan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi persoalan sosial

Kota Serang masih memiliki beberapa permasalahan yang masih belum bisa diatasi secara tuntas seperti masih banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Serang. Kondisi seperti ini sangat meresahkan masyarakat, mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dan membuat tata kelola Kota terlihat kumuh. Berikut pada Tabel 1.1 data anak jalanan di Kota Serang:

**Tabel 1**

**Jumlah Anak jalanan Di Kota Serang Dari Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah (orang)
2015	150
2016	181
2017	74
2018	141
2019	142
2020	153

Sumber: Dinas Sosial Kota Serang

Dari data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah anak jalanan di Kota Serang mengalami fluktuasi. Adanya laporan mengenai banyaknya anak jalanan yang meresahkan masyarakat yang mengganggu keamanan dan keselamatan di jalan, mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Serang selaku pelaksana kebijakan memberikan perhatian penuh dalam menangani penanggulangan anak jalanan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia di Kota Serang.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Anak jalanan di Indonesia bisa dikatakan sebagai hasil dari pemanfaatan orang tua dibidang ekonomi, anak dijadikan sebagai mesin pencari uang. Faktor kemiskinan dan pengangguran menyebabkan kondisi ekonomi keluarga semakin memburuk, hal ini yang mengakibatkan seorang anak akhirnya terpaksa memilih untuk menjadi anak jalanan agar membantu perekonomian keluarga. Kondisi keluarga yang tidak harmonis dan kondusif di rumah berdampak kepada kondisi psikologis anak sehingga mendorong anak menjadi anak jalanan, dengan alasan di jalanan mereka bisa lebih bebas tanpa tekanan dari orangtua. Alasan lain yang membuat anak memilih anak jalanan karena keinginan untuk ikut dan bersenang senang bersama temannya, akibatnya mereka salah persepsi karena pergaulan bebas di jalanan, hal inilah yang menyebabkan anak jalanan melakukan tindakan mengarah kepada kriminal seperti pencurian, mencopet, pemerkosaan dan narkoba sehingga ini menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penanganan anak jalanan. Penelitian pertama dilakukan oleh Sakman, (2016) dengan judul Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Makassar. Hasil Penelitian implementasi perda dalam pembinaan anak jalanan belum berjalan secara optimal

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Syahrul dan Amika Wardana, (2017) dengan judul Analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa layanan pendidikan formal dan informal khusus anak jalanan sudah tidak relevan dengan kondisi kehidupan saat ini. Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi Shadiqin, (2018) dengan judul peran keluarga dalam pembinaan anak jalanan di jalan Sultan Alauddin Makassar. Hasil Penelitian Peran keluarga dalam pembinaan pendidikan anak jalanan di kawasan jalan Sultan Alauddin tidak berjalan dengan baik.

Penelitian sebelumnya yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri, (2019) dengan judul Teori Biddle. Hasil Penelitian Peran keluarga dalam pembinaan pendidikan anak jalanan di kawasan jalan Sultan Alauddin tidak berjalan dengan baik. Penelitian sebelumnya yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, dkk. (2020) dengan judul Household Survival Strategy. Hasil Penelitian Faktor ekonomi dan psikologis menjadi alasan anak jalanan menjadi anak jalanan, banyak yang putus sekolah dan sebagian anak jalanan mendapat kekerasan fisik

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks dan locus penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan dengan locus Kota Serang sedangkan aspek fokus dan kocus penelitian sebelumnya yakni Studi Anak Jalanan, tinjauan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan locus Kota Makassar (Sakman, 2016). Analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan dengan locus Kota Yogyakarta (Syahrul dan Amika Wardana, 2017). Peran keluarga dalam pembinaan anak jalanan di jalan Sultan Alauddin dengan locus Makassar (Nurhadi Shadiqin, 2018). Penanganan anak jalanan berbasis *Community Development* (Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri, 2019). Fenomena anak jalanan di Kota Cirebon dengan locus kota Cirebon, (Suryadi, dkk. 2020).

### 1.5 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, faktor penghambat, serta upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Serang.

## II. METODE

Peneliti ini menggunakan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan cara deskripsi. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi (Edward III, 2010) dengan dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, Struktur Birokrasi. Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dalam Sugiyono (2016:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan Informan yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kepala Bidang Pemberdayaan sosial, Kepala Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan

Sosial yang dimana masing masing 1 orang dan Anak jalanan 10 orang . Dalam penelitian kuantitatif ini instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner (angket), observasi dan gabungan ketigannya. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) mengatakan bahwa proses analisis data deskriptif melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu: (1) reduksi data atau penyederhanaan data, (2) paparan data, (3) penarikan kesimpulan

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang anak jalanan di Kota Serang Provinsi Banten .menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari empat dimensi ,yakni komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi . Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan di Kota Serang**

##### **3.1.1 Komunikasi**

###### **a. Transmisi**

Dimensi transmisi menghendaki agar informasi atau kebijakan publik tersampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan tidak hanya tersampaikan kepada pelaksana kebijakan saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa informan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan anak jalanan pada Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 tentang pelaksanaan perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat merupakan produk hukum yang di buat oleh Pemerintah dan DPRD Kota Serang. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka dilakukan pertemuan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan maksud tersampainya informasi yang jelas terkait tujuan dibentuknya Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Serang selaku pelaksana kebijakan ini juga telah menginformasikan kepada masyarakat adanya Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani penyakit masyarakat termasuk anak jalanan yang ada di Kota Serang.

###### **b. Kejelasan**

Dimensi Kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. Sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan publik tersebut dapat diketahui dan dipahami dengan jelas. Dengan adanya kejelasan maka pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa narasumber dapat penulis simpulkan bahwa dimensi kejelasan dalam indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan terciptanya kepastian antara para pelaksana kebijakan terkait jelasnya maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

### c. Konsistensi

Dimensi konsistensi menghendaki agar perintah yang disampaikan harus konsisten dan jelas untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan ataupun pihak yang terkait. Dari wawancara yang dilakukan peneliti mengetahui bahwa Dinas Sosial Kota Serang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada.

Kepala Dinas Sosial juga menyatakan bahwa:

Setiap tiga bulan sekali kita melaksanakan Bulan Bhakti yang bertujuan untuk menertibkan para penyandang penyakit masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak jalanan didalamnya. Dalam melaksanakan kegiatan bulan bhakti ini kita berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Satpol PP, LSM, dan tokoh masyarakat untuk turut serta menyukseskan kegiatan ini. Nantinya para penyandang penyakit masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terjaring pada saat bulan bhakti akan kami data dan akan diberikan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dimensi konsistensi dalam indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik di Dinas Sosial Kota Serang. Hal ini dikarenakan para pelaksana kebijakan seperti Dinas Sosial Kota Serang dan SATPOL PP Kota Serang telah melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dengan baik.

### 3.1.2 Sumber Daya

Menurut Edward III sumber daya yang dimaksud ialah staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Empat hal tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tujuan dari kebijakan yang sudah direncanakan sebelumnya tidak akan berhasil pelaksanaannya apabila tidak memiliki sumber daya yang baik .

#### a. Staf (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia yang baik dan berkualitas sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik..

Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Drs. H. Moch. Poppy Nopriadi, M.Si pada saat di wawancara mengatakan bahwa:

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang secara kuantitas bisa dibilang masih terbatas. Hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun ditahun ini sehingga hanya menyisakan 17 orang pegawai negeri sipil dibantu dengan 8 orang tenaga honorer. Namun secara kualitas para pegawai disini kemampuan yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ditengah-tengah kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di Kota Serang, para pegawai disini masih memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menangani permasalahan sosial seperti anak jalanan yang sedang saudara teliti.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti mengetahui bahwa jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial masih sangat terbatas, hal dikarena banyak pegawai yang pensiun sehingga hal ini menjadi salah satu kendala yang dialami oleh Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Anak Jalanan di Kota Serang yang berpedoman pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 Dinas Sosial Kota Serang memiliki sumber daya manusia yang terbatas sehingga dapat menghambat terlaksananya kebijakan tersebut. Namun dari segi kualitas para pegawai di Dinas Sosial Kota Serang tetap menjalankan tugasnya untuk menangani permasalahan anak jalanan dan penyakit masyarakat lainnya walaupun dalam segi kuantitas mereka masih kekurangan.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut Dinas Sosial Kota Serang selalu berkoordinasi dengan unsur pemerintah lain dalam upaya menangani permasalahan anak jalanan di Kota Serang. SATPOL PP Kota Serang selaku penegak peraturan daerah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Serang untuk

menangani anak jalanan dan penyakit masyarakat lainnya. SATPOL PP bertugas untuk menangkap dan menindak anak jalan saat melakukan kegiatan razia dan dibantu oleh pekerja sosial dari Pos Sahabat Anak (PSA) untuk mendata anak jalanan yang tertangkap dan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Serang untuk dilaksanakan pembinaan dan rehabilitasi.

#### **b. Wewenang (Sumber Daya Kewenangan)**

Wewenang merupakan besaran jangkauan hak dan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, memberi perintah, dan memberikan tanggung jawab.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti mengetahui bahwa permasalahan anak jalanan sudah menjadi kewenangan Dinas Sosial terutama dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi sedangkan untuk penertiban dan penangkapan menjadi kewenangan SATPOL-PP.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Serang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak jalanan yang tertangkap oleh SATPOL PP Kota Serang pada saat razia, pembinaan dilakukan guna membentuk mental anak jalanan agar menyadari bahwa menjadi anak jalanan merupakan sesuatu yang salah sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk kembali turun kejalanan.

Selain memberikan pembinaan dan rehabilitasi, Dinas Sosial Kota Serang juga memberikan beberapa pelatihan kepada anak jalanan. Hal ini dimaksudkan agar anak jalanan sebelum dilepaskan kembali ke masyarakat mereka memiliki skill untuk berusaha sehingga mereka tidak memiliki pemikiran untuk kembali menjadi anak jalanan. Setelah diberikan pelatihan Dinas Sosial Kota Serang memberikan modal kepada anak jalanan untuk menjalankan usahanya dengan syarat dan ketentuan tertentu dan dipantau secara berkala perkembangannya.

#### **c. Sumber Daya Informasi**

Informasi memiliki dua bentuk, yakni informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai kepatuhan dari parapelaksana kebijakan terhadap kebijakan publik yang ada.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat penulis dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa sumber daya informasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang bisa dibilang baik. Adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai wadah bagi pemerintah untuk pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap kepada masyarakat ditambah dengan ditempatkannya pegawai di *front office* dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 oleh Dinas Sosial Kota Serang.

#### **a. Sumber Daya Fasilitas**

Fasilitas merupakan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kebijakan. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud berupa kantor, kendaraan operasional, ruang kerja, ruang pelayanan, ruang pimpinan, dan peralatan lainnya yang menunjang terlaksananya kegiatan oleh pelaksana kebijakan.

Hasil wawancara beberapa informan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk memnanggulangi anak jalanan kurang memadai. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi penulis terhadap Dinas Sosial Kota Serang yang memiliki fasilitas yang kurang memadai. Gedung kantoryang masih berpindah-pindah karena masih mengontrak, rumah singgah sebagai sarana untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi masih mengontrak,

kendaraan operasional hanya berjumlah 2 unit untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial. Keterbatasan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Serang dikarenakan anggaran yang dimiliki sangat minim, sehingga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang. Untuk menutupi keterbatasan itu Dinas Sosial Kota Serang berkoordinasi dengan SATPOL PP dalam kegiatan untuk menangani anak jalanan di Kota Serang.

### **3.1.3 Disposisi**

Disposisi merupakan sikap ataupun karakteristik yang dilakukan pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan publik sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Variabel Disposisi terdiri dari beberapa indikator, yakni:

#### **a) Pengangkatan Birokrasi**

Pengangkatan birokrasi merupakan proses pemilihan para pegawai yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Pengangkatan Birokrasi dalam Dimensi Disposisi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 sudah baik karena penempatan posisi pegawai sudah sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai dalam melaksanakan kebijakan publik dan tugas-tugas lainnya yang menyangkut permasalahan sosial di Kota Serang.

#### **b) Insentif**

Insentif merupakan teknik untuk mengatasi permasalahan pada pelaksana kebijakan agar mau bekerja menjadi lebih baik lagi. Cara yang dilakukan dapat berupa memberikan reward dari pimpinan baik berupa uang, pujian, promosi jabatan, ataupun hal lainnya yang dapat membuat senang pelaksana kebijakan sehingga memiliki rasa untuk meningkatkan pekerjaannya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama beberapa narasumber terkait indikator Insentif dalam Dimensi Disposisi Birokrasi dapat penulis simpulkan bahwa pemberian insentif di lingkungan Dinas Sosial Kota Serang sudah dilakukan. Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial mendapatkan pemberian insentif berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ataupun pujian dari pimpinan akan kinerjanya yang baik dan memuaskan. Namun untuk pekerja sosial yang turun kelapangan Dinas Sosial kurang memperhatikan mereka, pemberian insentif yang diberikan tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan kepada mereka. Hal ini dapat memicu terhambatnya proses implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan oleh Dinas Sosial.

### **3.1.4 Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan salah satu variabel dalam teori implementasi milik George Edward III yang sangat mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik. Dalam variabel Struktur Birokrasi terdapat 2 (dua) dimensi yang dapat mempengaruhi keberhasilan struktur birokrasi, yakni:

### **a. Standard Operational Procedures (SOP)**

Dalam suatu pekerjaan terdapat ukuran dasar dan standar baku untuk mengatur bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Ukuran dasar atau standar baku tersebut berasal dari dalam organisasi untuk mengatur bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan didalam organisasi yang kompleks sehingga dapat menimbulkan keseragaman yang besar dalam penerapan aturan didalam organisasi.

Hasil wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa *Standard Operational Procedures (SOP)* yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani anak jalanan sudah berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kota Serang melakukan pendataan, pembinaan, dan rehabilitasi oleh seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia kepada anak jalanan yang tertangkap oleh SATPOL PP sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa struktur birokrasi dan SOP yang ada di Dinas Sosial Kota Serang sudah berjalan dengan baik dalam menangani anak jalanan di Kota Serang.

### **b. Fragmentasi**

Fragmentasi merupakan bentuk penyebaran tanggung jawab suatu bagian dalam organisasi kepada beberapa unit kerja dibawahnya dan membutuhkan koordinasi anatar unit kerja.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan ditemukan fakta bahwa pemerintah telah melakukan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dengan baik kepada para pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Sosial Kota Serang dan SATPOL PP Kota Serang untuk menangani anak jalanan di Kota Serang. SATPOL PP dengan tanggung jawabnya untuk menangkap dan menindak anak jalanan, dan Dinas Sosial dengan tanggung jawabnya untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak jalanan yang tertangkap. Pembagian tanggung jawab ini bertujuan untuk mempermudah dan mensukseskan pelaksanaan kebijakan untuk menangani anak jalanan di Kota Serang.

## **3.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan Di Kota Serang**

### **A. Internal**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, peneliti dapat simpulkan bahwa, Dinas Sosial Kota Serang masih memiliki banyak faktor penghambat dari lingkup internal. Minimnya anggaran menjadi faktor utama terhambatnya proses implementasi kebijakan terkait penanganan anak jalanan di Kota Serang, ditambah ada 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masing-masing kategori memiliki programnya masing-masing dan membutuhkan anggaran. Anggaran yang sangat minim dan harus dibagi kepada kategori lainnya menyebabkan anggaran yang dimiliki untuk menangani anak jalanan di Kota Serang semakin minim. Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang juga sangat minim dan dapat menghambat proses penanganan anak jalanan. Kantor yang sempit, rumah singgah yang masih mengontrak, ditambah sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi hambatan bagi Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani anak jalanan di Kota Serang.

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Serang masih menjadi hambatan. 17 orang pegawai Dinas Sosial Kota Serang harus berhadapan dengan 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masing-masing kategori memiliki jumlah yang tidak sedikit. Minimnya jumlah pegawai yang dimiliki dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan publik.

## **B. Eksternal**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari lingkup eksternal yang dialami Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani anak jalanan yaitu anak jalanan itu sendiri. Mental dan kebiasaan mereka sangat sulit dirubah, walaupun pemerintah telah memberikan pembinaan, pelatihan, dan bantuan untuk melakukan usaha mereka tetap saja kembali menjadi anak jalanan. Bahkan bantuan peralatan yang diberikan seperti alat perbengkelan, steam motor, dan konter pulsa yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang dijual kembali. Hal ini dilakukan karena yang mereka butuhkan adalah uang bukan peralatan. Hal ini ditambah dengan masih apatisnya masyarakat Kota Serang dengan masih memberi anak jalanan uang, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat anak jalana termasuk kategori penyakit masyarakat yang perlu diberantas. Dengan masih diberikan uang oleh masyarakat kepada anak jalanan, mereka akan merasa nyaman karena masyarakat selalu memberikan mereka uang. Hal ini yang menyebabkan anak jalanan selalu kembali ke jalanan dari pada mengolah pemberian yang diberikan oleh pemerintah.

### **3.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan Di Kota Serang**

#### **a. Internal**

Dari wawancara yang dilakukan peneliti mengetahui bahwa upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi faktor penghambat dari lingkup internal yaitu Dinas Sosial telah melakukan pengajuan penambahan anggaran kepada Pemerintah Kota Serang.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti mengetahui bahwa pengajuan penambahan anggaran tersebut guna memperbaiki sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya agar dalam melaksanakan tugas dapat berjalan secara optimal.

#### **B. Eksternal**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang dialami dalam proses Implementasi Peraturan Walikota Serang Nomor 41 tahun 2017 untuk menangani anak jalanan. Dinas Sosial Kota Serang telah mengajukan penambahan anggaran kepada Pemerintah Kota Serang. Pengajuan penambahan anggaran ini dilakukan karena anggaran yang dimiliki sangat minim, mengingat banyaknya permasalahan sosial yang harus ditangani oleh Dinas Sosial seperti 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masing-masing kategori membutuhkan anggaran agar dapat merealisasikan program-programnya. Selain itu penambahan anggaran juga diperlukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Seperti mendirikan panti sosial, panti rehabilitasi, dan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang menunjang pekerjaan.

Peningkatan komitmen bagi para pegawai Dinas Sosial dan pekerjasosial lainnya juga perlu dilakukan mengingat sulitnya anak jalanan untuk dibina agar kembali ke jalan yang benar. Selain itu para *stakeholders* juga perlu memiliki tekad yang kuat untuk menangani anak jalanan. Permasalahan anak jalanan merupakan kewajiban bagi pemerintah maupun masyarakat karena mereka juga warga negara yang memiliki hak yang sama dengan kita untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Pemerintah dan pegawai Dinas Sosial harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bekerja dengan ikhlas untuk membantu menangani anak jalanan mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Aktivitas anak jalanan di Kota Serang beraneka ragam, ada yang menjadi pengamen, manusia silver dan pengemis yang meminta-minta. Mereka dapat dijumpai dengan mudah di lampu merah, pusat perkotaan, tempat wisata dan pusat keramaian lainnya. Tidak sedikit diantara anak jalanan yang putus sekolah karena faktor ekonomi dan keluarga.

## IV. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil wawancara, obserervasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis lakukan di Dinas Sosial Kota Serang dalam rangka mengetahui proses implementasi Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan di Kota Serang maka diperoleh kesimpulan bahwa dari 8 (delapan) dimensi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator pada Implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Serang masih ditemukan kendala, sehingga tidak berjalan secara optimal dan harus ditingkatkan lagi. Adapun kendala yang penulis temukan terdapat pada teori Edward III yaitu dimensi Sumber Daya dan dimensi Disposisi. Kendala ditemukan pada indikator staf dan indikator fasilitas pada Dimensi Sumber Daya. Pada Dimensi Disposisi penulis menemukan kendala pada indikator Insentif. Pada Dimensi Lingkungan penulis menemukan kendala pada indikator Rumah Singgah. Pada Dimensi Kelembagaan Penulis menemukan kendala pada indikator Sosialisasi.
- 2) Faktor penghambat internal ialah: minimnya jumlah anggaran yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak jalanan didalamnya di Kota Serang, kurangnya kuantitas pegawai yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani permasalahan sosial yang kompleks di Kota Serang ,minimnya fasilitas yang dimiliki Dinas Sosial Kota Serang untuk menangani anak jalanan di Kota Serang. Faktor penghambat eksternal ialah: sulitnya merubah mental dan perilaku anak jalanan melalui pembinaan, pelatihan, dan bantuan yang diberikan agar tidak kembali turun kejalanan untuk menjadi anak jalanan, masih kurangnya peran dari masyarakat untuk menyukseskan Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 karena masih memberikan uang kepada anak jalanan yang menyebabkan anak jalanan betah pergi ke jalanan.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk mengatasi faktor penghambat ialah: Dinas Sosial Kota Serang telah melakukan pengajuan penambahan anggaran kepada Pemerintahan Kota Serang karena banyaknya anggaran yang harus dikeluarkan untuk menangani 26 Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak jalanan di Kota Serang, menambah sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani anak jalanan di Kota Serang, meningkatkan komitmen para pegawai Dinas Sosial Kota Serang, Pekerja Sosial, dan *stakeholders* lainnya untuk menuntaskan permasalahan anak jalanan di Kota Serang mengingat masih banyaknya jumlah anak jalanan dan sulitnya membina mental anak jalanan agar tidak kembali ke jalanan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan Di Kota Serang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Dinas Sosial Kota Serang beserta jajarannya dan kecamatan Loa Janan Ilir yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri, 2019. *Penanganan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang*. Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 7, No. 2, Desember 2019
- Nurhadi Shadiqin, 2018. *Peran keluarga Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Jalan Sultan Alauddin Makassar*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar
- Sakman, 2016. *Studi Anak Jalanan ( Tinjauan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar)*. Jurnal Supremasi, Vol. 9, No. 2, Oktober 2016
- Suryadi, dkk .2020. *Fenomena Anak Jalanan Di Kota Cirebon*. Jurnal Equalita, Vol. 2 No. 1, Juni 2020.
- Syahrul dan Amika Wardana, 2017. *Analisis Kebijakan Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta*. Jurnal Harmoni Sosial: Pendidikan IPS, Vol. 4, No. 2, September 2017
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.